

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Cina sebagai salah satu negara dikawasan Asia dengan jumlah penduduk terbesar didunia. Populasi penduduk yang begitu besar merupakan aset sekaigus menjadi tantangan bagi pemerintah Cina dalam mensejahterakan rakyatnya. Republik Rakyat Cina (RRC) disanjung sebagai sebuah negara penerap experimen pembangunan sosialis yang berhasil. Cina pada masa Mao Ze Dong sangat mengedepankan pengerahan tenaga kerja yang besar atau sistem padat karya dalam praktik pembangunannya, sehingga diidentifikasi sebagai model pembangunan yang mendukung partisipasi rakyat. Strategi pembangunan yang digunakan lebih menekankan pada faktor sumberdaya manusia dan partisipasi masyarakat, khususnya kaum petani dipedesuan dan kaum buruh diperkotaan.¹

Kebijakan Mao yang lebih memfokuskan pada kekuatan politik dibandingkan kekuatan ekonomi menyebabkan ekonomi Cina mengalami perkembangan yang lambat, kehidupan rakyat sangat sederhana dan banyak yang melarat. Kebijakan politik yang cukup radikal melahirkan kebijakan politik isolasi, yang pada dasarnya Cina menutup diri dari hubungan dengan dunia internasional. Hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain didunia sangat sedikit bahkan hampir

tidak ada. Negara tirai bambu ini kemudian lebih fokus dalam pembangunan dalam negeri dengan pengarahannya sumberdaya manusia dan partisipasi rakyat. Selama terjadinya politik isolasi, hubungan Cina dengan dunia internasional mengalami hambatan khususnya proses masuknya bantuan asing ke Cina.

Munculnya kebijakan reformasi ekonomi pada masa Deng Xiaoping telah merubah arah kebijakan pemerintahan Cina khususnya dibidang Politik dan Ekonomi. Mao Ze Dong yang lebih mengedepankan stabilitas politik atau pertimbangan politik dibandingkan pertimbangan ekonomi atau stabilitas ekonomi mengakibatkan banyak kemunduran pembangunan RRC, adanya indikasi perubahan kebijakan yang cukup drastis pada masa Deng Xiaoping dengan penekanan pada sektor ekonomi merupakan indikator terjadinya perubahan baik secara ekonomi maupun politik di Cina.

Para penganut sosialisme mendasarkan keyakinan mereka pada teori bahwa segala macam tingkah laku manusia di alam dunia ini selalu dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi². Penguasaan sektor alat -- alat produksi oleh suatu golongan tertentu telah menimbulkan gejala yang disebut " sebagai eksploitasi manusia oleh manusia". Tumbuhnya kelas borjuasi dan kapitalisme. Termasuk dengan bentuknya yang paling tinggi yaitu imperialisme yang semuanya dituduh sebagai akibat dari sistem yang tidak adil. Dengan demikian perjuangan kaum sosialis adalah untuk

menciptakan suatu sistem yang sama rasa dan sama rata dengan cara menguasai alat alat produksi dan modal. Mereka berharap dengan cara demikian segala bentuk eksploitasi dapat dihapuskan untuk selamanya dari muka bumi ini.

Sistem inilah kemudian pernah diterapkan oleh Cina mulai tahun 1949 ketika kaum komunis mulai berkuasa. Segala bentuk kegiatan ekonomi diluar jalur resmi, dalam skala kecil apapun dianggap sebagai kegiatan diluar hukum dan mendapat cap sebagai kegiatan " ekor kapitalisme". Dalam hal penguasaan pemerintah atas segala penguasaan ekonomi masyarakat ini pemerintah Republic Rakyat Cina (RRC), terutama pada masa Mao Ze Dong (1949 -1976), bertindak lebih ekstrim lagi. Bukan hanya kegiatan ekonomi saja yang diatur oleh pemerintah, tetapi segala macam kehidupan masyarakat di Cina. Partai mengatur rakyat cina dalam memperoleh pendidikan , pekerjaan, tempat tinggal, makanan, mendapat jodoh sampai pada punya anak dan kapan boleh melahirkan.³ Hal itu dimaksudkan untuk mengendalikan semua kehidupan masyarakat supaya sesuai dengan Keinginan Partai Komunis (PKC) dan pemerintah serta mencegah segala bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat sosialis di Cina.

Disamping itu, kebijakan Mao Ze Dong yang semakin memperketat sistem tersebut dengan diberlakukannya hukum Besi politik sebagai panglima. Mao dikenal sebagai bapak pendiri RRC yang revolusioner romantis yang menginginkan agar

³ D. H. H. ...

praktik sosialisme di Cina agar sesuai dengan teori. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa yang paling penting dalam kehidupan rakyat Cina adalah “kesadaran politik yang benar”. Hanya dengan kesadaran politik yang benar itulah segala tugas bisa dijalankan dengan benar pula.⁴ Oleh karena itu Cina pada masa Mao selalu dibuat hiruk pikuk oleh kampanye-kampanye gerakan politik, mulai dari gerakan 100 Bunga dan gerakan anti Kanan (1956), lompatan jauh kemuka (1957 – 1960), sampai Revolusi kebudayaan (1966 – 1969).⁵

Mao memiliki konsep kerja terendiri untuk menjelaskan konsep pembangunan ekonomi dan politiknya yang berbasiskan Sosialisme, yang disebutnya sebagai teori penentuan waktu.⁶

Pada masa Mao, terdapat kecederungan bahwa Mao lebih cenderung memcentingkan politik daripada pembangunan ekonomi. Sehingga ada kecenderungan menelantarkan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu ada sebagian dari generasi dewasa pada Zaman Cina dibawah kepemimpinan Mao balik menggugat,” bahwa kami telah berbuat banyak dan berkorban banyak untuk sosialisme, tetapi apa yang diberikan sosialisme kepada kami?” dengan kata lain ada pertanyaan yang sangat mendasar yang ditujukan kepada revolusi Cina, yaitu apakah manusia demi revolusi atau apakah revolusi demi manusia.

⁴ *Ibid*, p 110

⁵ *ibid*

⁶ Lihat Richard L. Ross, “New Light on Mao: His views on the Soviet Union's Political Economy” China

Deng Xiaoping, yang sejak tahun 1978 kembali ke kalangan politik Cina membawa konsep perubahan yang pada akhirnya merubah sistem yang ada di Cina, Cina pun kemudian dipimpin oleh Deng Xiaoping dengan membawa agenda perubahan yang dikenal dengan reformasi ekonomi yang dikenal dengan Gaige (perubahan, reformasi) dan Kaifang (keterbukaan). Deng Xiaoping mulai memperkenalkan sistem ekonomi pasar dalam menggantikan sistem ekonomi komando Mao Ze Dong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Cina⁷.

Rakyat diberi kesempatan untuk Xiahai yang secara harfiah adalah " Terjun Kelautan ". Pada dasarnya adalah melakukan kegiatan dalam perekonomian bebas. Ini adalah kegiatan ekonomi ditingkat bawah, sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi dibawah slogan keterbukaan adalah diundangnya modal asing, sebagai akibatnya rakyat Cina untuk pertama kalinya diperkenalkan pada sistem baru yang menuntut persaingan disegala bidang, dengan kata lain kapitalisme dan segala kebaikan dan keburukanya kembali menyerbu Cina.

Munculnya Deng Xiaoping sebagai pemimpin Cina menggantikan Mao Ze Dong memberi perubahan yang sangat signifikan dalam perkembangan Cina kedepan, adanya perbedaan prioritas pembangunan tentu menjadi hal sangat menonjol dalam kepemimpinan Deng Xiaoping dengan Mao Ze Dong, khususnya dalam bidang ekonomi dimana pada masa Deng Xiaoping para pemimpin tidak boleh lagi terlalu berkatat pada ideologi Komunis, melainkan lebih menekankan pada bidang

ekonomi.⁸ Disamping itu, menurut Deng Xiaoping, selama dua dasawarsa (1958 – 1978) prekonomian Cina jalan ditempat, tidak ada kemajuan dimasyarakat. Standar hidup begitu begitu saja, sejak Deng Xiaoping membacakan buah pikirannya dalam pidato utamanya di pleno ketiga sidang komite sentral kesebelas Partai Komunis Cina (PKC) 13 Desember 1978, Cina melakukan Modernisasi pembangunan dengan penekanan pada sektor ekonomi. Deng dengan konsep reformasinya kemudian melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar khususnya dalam bidang ekonomi dengan merubah sistem ekonomi Cina dari sistem ekonomi komando yang terencana dari pusat (*Centrally Planned Economy*) pada kemampuan Cina untuk memeluk ekonomi atau beralih ke sistem ekonomi pasar (*market economy*).⁹ Pada tahun-tahun 1980-an, pada awal reformasi, muncul kebijakan pembebasan harga-harga dari kontrol Negara yang kemudian disusul dengan munculnya “perusahaan-perusahaan Dcsa” (*xiang-zhen qiye*) serta pengusaha swasta dan diisinkannya perdagangan internasional.¹⁰ Deng Xiaoping membangun Cina dengan konsep Sosialismenya yang disebutnya dengan Sosialisme model Cina, menurut Deng Xiaoping “ kemiskinan bukan Sosialisme,” Sosialisme berarti melenyapkan kemiskinan.” Inilah yang kemudian dikenal dengan sosialisme model Cina dan bukan Kapitalis Sosialis.¹¹ Terjadinya perbedaan kebijakan pada masa Mao dengan Deng Xiaoping merupakan hal menarik bagi penulis yang kemudian melatar belakangi penulis

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

menulis pengaruh kebijakan Ekonomi pada Masa Deng Xiaoping terhadap politik luar negeri Cina.

B. Tujuan Penulisan

Secara garis besar ada dua tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini, *Pertama*, mencari pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai Pengaruh Kebijakan Ekonomi Deng Xiaoping Terhadap Politik Luar Negeri Cina. Dimana pada masa Deng Xiaoping telah terjadi perubahan sistem dan kebijakan di Cina. Kedua, sebagai prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (*International Program*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Pokok Permasalahan

Dari uraian tersebut diatas diajukan pokok permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana Pengaruh Kebijakan Ekonomi Deng Xiaoping Terhadap Politik Luar Negeri Cina?

D. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan pokok permasalahan tersebut maka penulis menggunakan

Konsep kebijakan luar negeri menurut Muchtar Kusumaatmaja adalah :

"Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Politik luar negeri adalah komponen dari kebijakan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi – kondisi riil dalam negeri".¹²

Dalam pengertian demikian kebijakan luar negeri dipahami sebagai strategi yang mendasari tindakan-tindakan Negara dalam hubungannya dengan Negara lain, untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan segala kemampuan dan kekuatan atau sumber daya domestik sebelum politik luar negeri dilaksanakan.

Politik luar negeri suatu Negara, pada dasarnya ditentukan oleh beberapa faktor seperti : kepentingan nasional, tujuan nasional, konfigurasi geo politik dan sejarah nasional, sehingga arah kebijakan pemerintah diarahkan untuk pembangunan stabilitas politik dalam negeri, dimana kepentingan nasional selalu dihubungkan dengan faktor politik dalam negeri suatu Negara. Dalam pengertian tersebut, pembangunan ekonomi politik dan modernisasi bagi stabilitas politik ekonomi dan keamanan merupakan hal yang mendasari kepentingan nasional RRC dalam memutuskan kebijakan luar negerinya. Dalam kasus RRC, reformasi ekonomi yang dijalankan Deng Xiaoping menjadi faktor politik dalam negeri yang paling mempengaruhi dalam pembuatan keputusan kebijakan politik luar negeri RRC.

¹² Muchtar Kusumaatmaja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Perkembangan Undang-Undang Baru*

Decision Making Theory

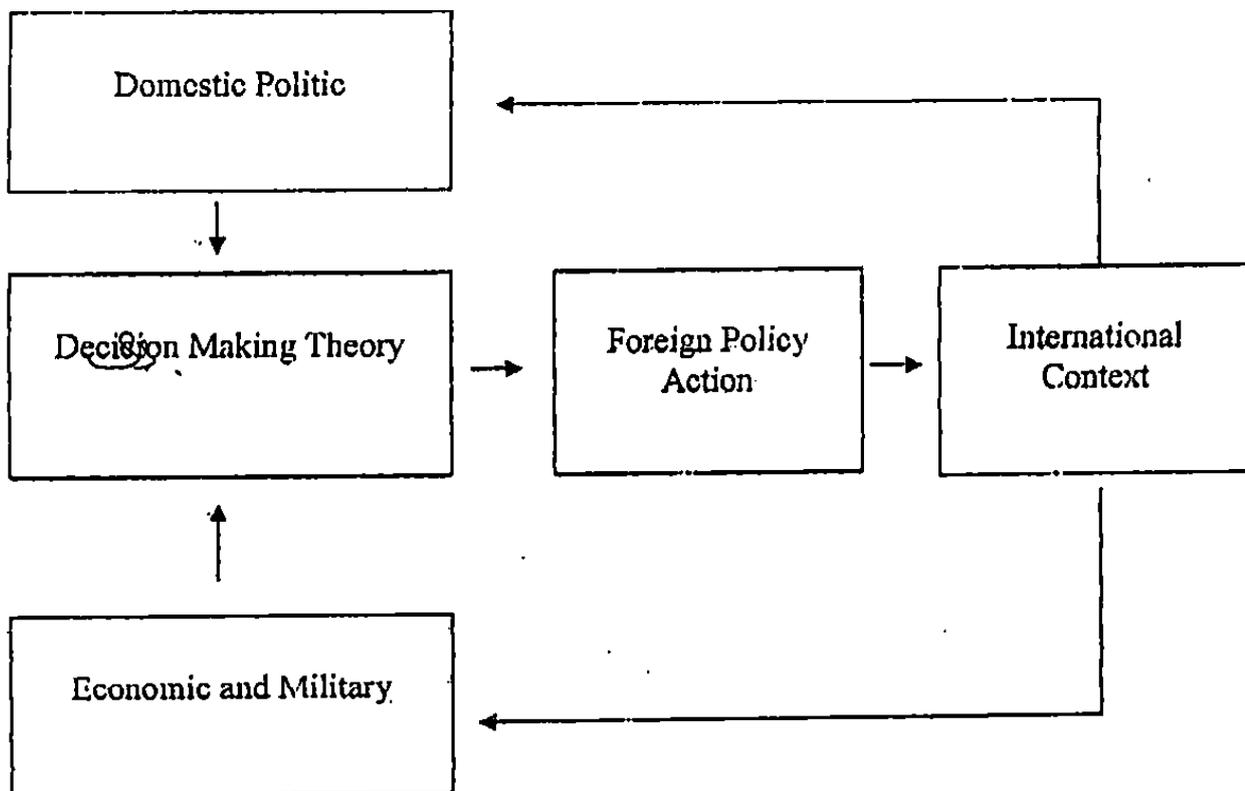
Adapun untuk menganalisa sebuah kebijakan luar negeri, penulis menggunakan *Decision making theory* (Teori Pembuatan Keputusan), khususnya *foreign policy decision making*. Teori pembuatan keputusan mengidentifikasi sejumlah variable yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variable tersebut, teori ini mengarahkan perhatian secara langsung bukan hanya pada Negara sebagai abstraksi metafisik atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut "Eksekutif", melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia, khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah, yaitu mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya, adalah tindakan Negara. Tindakan Negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama Negara¹³.

Decision making theory merupakan tindakan memilih alternatif tersedia dimana terdapat adanya suatu ketidak pastian. Didalam politik luar negeri biasanya kurang dikenal, jarang terdapat alternatif kebijakan yang sudah pasti. Pembuatan keputusan juga bisa dikatakan sebagai pilihan abstrak sampai alternatif yang paling mungkin bisa diterapkan atau digunakan kepada sebuah proses bertahap yang

¹³ James E Dougherty and Robert L. Pfaltzgraf ; Jr., *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Hengamta Dahlan, dan Tulus Wersito (Yogyakarta :

Menurut Willam D.Coplin¹⁴. Decision making theory digambarkan sebagai berikut

Skema I, 1: Skema pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin



Sumber :William D. Coplin, Intrudaction to International politik : *A Theoretical Overview*. Terjemahan Marbun (Bandung : CV Sinar Baru, 1991) p 30.

Para pembuat keputusan luar negeri dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dikategorikan dalam:

1. Situasi Politik Dalam Negeri (*Domestic Politic*) dinegara tersebut, termasuk aktor budaya yang mendasari tingkah laku politik aktornya.
2. Kemampuan Ekonomi dan Militer negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan serta hubungan negara tersebut dalam hal perdagangan dan keuangan.
3. Konteks Internasional (*International Context*) kondisi-kondisi internasional pada saat itu.

Besar kecilnya pengaruh dari masing masing faktor tertentu berlainan, serta tergantung pada negara yang akan dianalisis. Pengaruh Kebijakan Ekonomi Deng Xiaoping Terhadap politik Luar Negeri Cina Pada Masa Deng Xiaoping sangat dipengaruhi oleh ketiga indikator tersebut.

1. Situasi Politik Dalam Negeri

Situasi Politik dalam negeri merupakan indikator dalam melihat kemajuan dalam negeri suatu bangsa, semakin stabil kondisi politik dalam negeri maka semakin besar pula potensi kemajuan pembangunan suatu bangsa. Situasi politik Cina Pada masa Mao Ze Dong terkesan sangat menonjol dan menjadi prioritas dibandingkan sektor lainnya. Mao dikenal sebagai pemimpin dan bapak sosialis Cina yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dan kharismatik. Cina adalah negara yang menganut

yaitu PKC (Partai Komunis Cina). Partai yang didirikan oleh Mao Zedong ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di Cina khususnya pada masa Mao. Kondisi perpolitikan di Cina sangat diwarnai berbagai kebijakan yang radikal dan revolusioner, berbagai kebijakan yang cukup radikal dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pada masa Mao Zedong mewarnai situasi politik dalam negeri Cina seperti Land Reform, Lompatan Jauh Kemuka, Gerakan 100 Bunga dan Anti Kanan, sampai pada Revolusi Kebudayaan.¹⁵

Birokrasi pemerintahan Cina banyak dikuasai oleh kelompok moderat yang diidentifikasi dengan orang-orang yang tidak bersikap ekstrem, dan berusaha mencegah tindakan yang berbau radikalisme. Mereka kebanyakan duduk di birokrasi pemerintahan dan berpikir dengan seksama dalam menyusun kebijakan pembangunan, serta memperhatikan kepentingan ruang lingkup yang lebih luas, dari pada kelompok. Tokoh kelompok moderat ini diwakili oleh figur Zhou Enlai dan Hua Guofeng. Kedua orang itu dikenal sebagai perdana menteri (PM)RRC, suatu posisi tertinggi yang mereka duduki didalam pemerintahan setelah jabatan kepala negara dihapuskan oleh Mao Zedong. Zhou menguasai kursi PM mulai dari berdirinya RRC (1949) hingga ahir hayatnya (1976) sedangkan Hua menguasai kursi itu sesudahnya, sampai kelompok pragmatis realis Deng Xiaoping dan para pengikutnya berkuasa penuh ditahun 1982.

¹⁵ Ibid p.3.

Kemampuan Huo selama ini dalam bekerjasama dalam pemerintahannya Zhuo yang moderat mendukungnya untuk dipilih sebagai PM menggantikan Zhou disamping kekhawatiran ketua Mao terhadap kondisi dan situasi politik dalam negeri Cina pada saat itu yang dilanda pertentangan sengit antara kelompok pragmatis-realis. Ketua Mao berpendapat bahwa mengangkat salah satu tokoh dari dua kelompok yang bertentangan tersebut sebagai PM, misalnya Deng Xiaoping dari pragmatis realis atau wakil PM Zhang I Chungqiao dari kelompok revolusioner radikal akan berakibat buruk bagi stabilitas politik RRC.¹⁶

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sikap ketua Mao mengambil kebijakan dengan tidak memilih salah satu tokoh dari kedua kelompok yang bertentangan dan memilih mengangkat Hua sebagai pengganti Zhou, hal ini tidak lain sebagai usaha menengahi rivalitas berat antara kelompok revolusioner-radikal dengan pragmatis realis, yang memungkinkan membesar menjadi perang saudara, kalau Mao Zedong sudah tidak ada.¹⁷ Hua dalam hal ini memainkan peran sebagai penengah ataupun penyangga dalam konflik politik yang terjadi di RRC, menjelang dan setelah kematian Mao.

Sebagai penerus kepemimpinan Mao, yang berarti pula sebagai penerus ajaran-ajarannya, kemudian Hua harus menghidapi kenyataan bahwa kelompok empat mengklaim dirinya sebagai Maois sejati, berambisi untuk meraih kedudukan-

¹⁶ Lihat Terril. *ibid.*.. mu'ni p.24.

kedudukan tertinggi dipartai dan pemerintahan. Mereka disinyalir berusaha mengadakan kudeta dan menentang pengangkatan Hua sebagai pengganti Mao.¹⁸ Mereka senantiasa mengemukakan dalam setiap kesempatan, bahwa kelompok merekalah yang sebenarnya merupakan pewaris kekuasaan Mao dan penerjemah pikir-pikirannya.

Wuang Hungwen diberitakan ingin menjadi ketua partai, Jiang Qing ingin menjadi kepala negara, Zhang Chungqiao ingin dipromosikan dari wakil Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri, dan Yao Wenyuan diantisipasi ingin menjadi idolog negara.¹⁹ Disisi lain kelompok pragmatis realis dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah Mao meninggal dunia, berusaha melakukan pendekatan yang baik dengan Hua, dengan melakukan politik pro statusquo dengan merelakan Hua sebagai pemegang kedudukan tertinggi dalam pemerintahan dan partai, sebagai PM dan ketua Partai. Langkah ini diambil oleh Deng Xiaoping dan para pengikutnya untuk memojokkan kelompok empat dan menyingkirkannya dari percaturan politik RRC, supaya mereka dapat memainkan peranan penting kembali. Dalam perkembangannya kemudian, Hua berhasil memperluas front anti kelompok empat dengan memanfaatkan rasa sakit hati diantara kader kader komunis diberbagai tempat, terutama bagi mereka yang menjadi korban akibat keganasan kelompok ini pada masa revolusi kebudayaan. Dan pada akhirnya kelompok empat dapat dibasmi

¹⁸ Mao meninggal 9 september 1976 dan kira kira sebulan setelah itu (11 oktober 1976), kelompok

dan dihancurkan pengaruhnya. Dengan situasi politik yang ada, maka Deng Xiaoping kemudian memanfaatkan peluang ini dengan mendekati para tokoh tokoh militer khususnya Veteran militer khususnya didalam TPR seperti Ye Jianying, Wei Guoqing dan Xu Shiqiu untuk meminta dukungan mereka dalam upaya untuk naik kembali ke kepemimpinan nasional.

Deng Xiaoping kemudian berhasil diangkat kembali kedalam kepemimpinan nasional oleh PM dan ketua partai Hua setelah mempertimbangkan input dan jasa-jasa dan peranan Deng Xioping. Rehabilitasi tersebut kemudian dilakukan pada konfrensi kerja komite-sentral PKC X, yang dilangsungkan pada bulan Maret 1977 yang memutuskan bahwa mengijinkan Deng tampil kembali dalam kepemimpinan nasional dengan catatan Deng harus mengakui kesalahan-kesalahannya dahulu.²⁰Deng kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua I partai dan Wakil ketua komisi Militer komite Sentral partai, Wakil PM, serta kepala staf umum. Deng Xioping tidak hanya dikembalikan kedudukannya tetapi justru semakin ditingkatkan posisi dan pengaruhnya, sementara itu, dalam persidangan sidang Pleno tersebut juga diputuskan mengenai nasib kelompok Empat yang sejak meninggalnya Mao semakin hilang kekuatannya. Pada akhirnya sidang pleno PKC menyatakan bahwa kelompok Empat yang radikal adalah musuh bersama, sehingga mereka dipecat dari PKC.

Setelah sidang Pleno ke-3 kongres komite sentral PKC X, polarisasi kekuasaan di RRC tampak berlangsung, Deng Xiaoping yang baru bangkit dari kejatuhannya berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya di PKC, dengan memasukkan orang-orang kedalam organisasi itu untuk menduduki jabatan pimpinan ataupun kepengurusan. Keadaan ini benar-benar terjadi pada kongres komite sentral PKC XI, yang diadakan di Beijing pada tanggal 12-18 Agustus 1977, dimana terlihat adanya perubahan komposisi-komposisi dalam keanggotaan, walaupun kepemimpinan pada level atas pada waktu itu terkesan sebagai hasil kompromi diantara kelompok-kelompok kekuatan yang terdapat di RRC, tetapi jelas telah menunjukkan berlangsungnya perkembangan baru. Pandangan inilah kemudian menjadi kesimpulan para pengamat luar yang membuat analisis terhadap perubahan komposisi keanggotaan komite sentral PKC dan politbiro yang terpilih dalam kongres ke XI PKC.

Dari komposisi keanggotaan, kelompok pragmatis-realis semakin menguasai kedudukan didalam komite pusat dan politbiro. Proposisi keanggotaanya adalah sebagai berikut : Anggota tetap Komite Sentral PKC terdiri dari 202 orang, sedangkan anggota alternatifnya terdiri dari 132 orang. Dari masing-masing jumlah keanggotaan itu, tercatat 71 orang baru sebagai anggota tetap dan 75 orang baru sebagai anggota alternatif. Jadi secara keseluruhan telah diangkat sebanyak 43,8 % anggota baru atau sebanyak 146 orang. Jika ditinjau lebih dalam lagi, yakni dari latar

partai atau kader pemerintah (sekitar 53%), 62 orang Veteran militer (sekitar 30,8 %) dan sisanya terdiri dari kader pekerja, kader petani dan intelektual muda. Lalu dari 169 orang gabungan Veteran partai dan militer ini , tercatat 56 orang merupakan "kader pembebasan", atau mereka yang dibersihkan pada masa Revolusi Kebudayaan.

Anggota politbiro PKC terdiri dari 23 anggota tetap dan 3 orang anggota alternatif. Dari keseluruhan jumlah anggota itu 11 orang adalah pemimpin militer. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Faksi militer merupakan kelompok yang paling berpengaruh dalam struktur kekuasaan tertinggi RRC. Kehadiran para pemimpin yang berasal dari kalangan militer ditingkat atas, semakin menarabahkan prestise atau kekuatan kelompok pragmatis-realis, terlebih-lebih dengan didudukinya jabatan kepala Staff Umum oleh Deng Xiaoping dan jabatan kepala Departemen Politik Umum Oleh Wei Guoqing, seorang kawan dekat Deng.²¹ Setelah kongres rakyat nasional ke-5 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1978, Hua Guopeng dikukuhkan sebagai PM RRC dan Deng Xiaoping pun kemudian semakin diperluas wilayah kekuasaannya menjadi Wakil PM, merangkap Ketua Konferensi Konsultatif Politik, Wakil ketua Partai, Wakil Ketua Komisi Militer Komite Sentral Partai, Kepala Staff Umum dan Ketua Operasi Front Persatuan.²² Hal ini kemudian diikuti

²¹ Para pemimpin militer ini dulunya satu kesatuan dengan Deng di TPR, dalam Tentara Lapangan II. Sebagai contoh Ye Jianying, wakil ketua partai dan Li Xiannian, Wakil PM, adalah anak buah Deng selama perang revolusioner ke-3 (1946-1949), yang berjasa sekali dalam menuntut restorasi penuh Deng Xioping ke tampuk kepemimpinan nasional. Patut digaris bawahi bahwa asal kesatuan dalam TPR akan menentukan basis dukungan bagi tiap individu yang ingin tampil dalam kepemimpinan politik RRC, mengingat faktor tersebut merupakan ikatan historis jangka panjang.

²² Michael Okseberg dan Richard Bush, *China Political Evolution 1972 - 1982, Problem of Communism*, Washington DC, 1982, p. 1 dan 2.

dengan diangkatnya orang-orang terdekat Deng Xiaoping untuk menduduki posisi-posisi penting dalam birokrasi pemerintahan dan partai di Cina, disamping itu, Deng kemudian melakukan operasi pembersihan dari orang-orang kelompok Hua.²³

Melalui sidang ke-2 kongres rakyat nasional ke-5 yang berakhir tanggal 1 juli 1979, Deng berhasil kembali menambah orangnya kedalam pemerintahan. Ahli ekonomi Chen Yun, Bo Yibo dan Yao Yilin, ketiganya adalah korban Revolusi kebudayaan. Diangkat sekaligus sebagai Wakil PM. Lalu, Peng Zhen, bekas Walikota Beijing yang dipecat pada awal Revolusi Kebudayaan, dipilih sebagai Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional. Sementara Fang Yi ditctapkan sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan RRC.

Deng benar-benar mencapai puncak kejayaannya ketika jabatan ketua partai yang selama ini diperlambangkan dengan figur Mao yang kharismatik dan Hua sebagai ahli warisnya, dihapuskan. Sedangkan jabatan Sekjen Partai yang telah dihapuskan sejak revolusi kebudayaan karena dikuasai oleh kelompok pragmatis realis, dihidupkan kembali. Disini, Hu Yaobang, tangan kanan Deng Xiaoping diangkat sebagai Sekjen Partai. Dengan demikian kelompok pragmatis realis menjadi penguasa tertinggi PKC, organ Supremasi dalam dalam politik di RRC. Sedangkan Hua digeser dari kedudukannya sebagai anggota Politbiro partai dan PM RRC.²⁴

²³ Antony Saich, *China : Politics and Governments*, New York ; St. Martin's Press 1981, p-87.

²⁴ Richard D.Nethercut dalam *leadership in China:Rivalry,Reform and Renewal.Problems of Communism* , Washington DC, March-April 1983,PP 30-34, mengemukakan bahwa dalam terminologi

2. Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi Cina mengalami keterpurukan ketika konsep revolusi kebudayaan Mao tidak berhasil. Selama revolusi kebudayaan berlangsung, banyak rakyat Cina yang menjadi korban, menderita, dipekerjakan dengan paksa dan yang menentang nasibnya akan berakhir dengan penderitaan dan kematian, pada tahun 1967 misalnya, terjadi kemerosotan disektor industri dan baru pulih kembali pada tahun 1969, meskipun sektor pertanian hanya sedikit menderita.²⁵ Selama 10 tahun kekacauan berlangsung terjadi kehancuran atas diri kaum muda Cina. Sekolah banyak yang ditutup dan yang masih buka pun mengalami penurunan secara kualitas dimana kurikulumnya disederhanakan dan sistem ujiannya dihilangkan. Sebagai akibat kebijakan revolusi kebudayaan, maka banyak anak usia sekolah yang dikirim dari kota ke desa untuk bekerja atau bertani, tercatat sekurang – kurangnya 100 juta orang muda kembali buta huruf, disamping itu banyaknya lowongan pekerjaan yang diisi oleh tenaga tenaga kerja yang tidak mampu. Terjadinya kemunduran diberbagai sektor seperti terjadinya kemelaratan, kemiskinan, kemunduran pendidikan, kehancuran seni dan peradaban, kebangkrutan pabrik pabrik merupakan bagian dari akibat revolusi kebudayaan yang dicetuskan Mao Ze Dong. Dari segi pemerataan, kebijakan pembangunan Mao menghasilkan prestasi yang

mewakili partai, militer dan pemerintah menggantikan *triumvirate* lama, yang terdiri dari Hua Guofeng, Ye Jianying dan Deng Xioping.

mengagumkan, dalam hal ini RRC memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, walaupun dari segi kesejahteraan hidup penduduk, kondisi RRC masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai catatan, untuk mendapatkan pertumbuhan pertanian yang sama dengan India sebesar 2,5 persen, dibutuhkan sebuah strategi pembangunan yang radikal, melalui mekanisme teror, kolektivisasi yang ekstrem, dan berbagai bentuk kampanye kekerasan.²⁶

Terpilihnya Deng Xiaoping sebagai pemimpin Cina setelah meninggalnya Mao Zedong, menyebabkan perubahan arah kebijakan Cina. Deng Xiaoping memiliki pemikiran yang berbeda dengan Mao Zedong mengenai strategi pembangunan yang selanjutnya dijalankan RRC. Deng memandang prioritas pemerataan ekonomi seperti yang dikembangkan Mao, memperlambat RRC dalam mencapai kemajuan yang diharapkan. Strategi pembangunan Mao yang radikal menurut Deng, telah menyebabkan biaya sosial yang besar dan telah menyebabkan dan membawa pengaruh yang buruk terhadap gerak pembangunan RRC. Padahal rakyat sudah banyak menderita sejak jaman nenek moyang mereka dulu, dan sekarang setelah 300 tahun, dihitung dari pertengahan dinasti Ming, RRC tetap saja miskin, terbelakang dan buta dalam kehidupan modern.²⁷

²⁶ Sebagai perbandingan, pertumbuhan sektor pertanian sebesar 2,5 persen di India tidak dicapai dengan aksi revolusioner seperti yang terjadi di RRC.

²⁷ Tempo 12 Januari 1958, p.20., sebagaimana dikutip dari Buku Kuning Deng Xiaoping yang

Deng Xiaoping kemudian mencanangkan strategi pembangunan ekonominya, yang walaupun dengan strategi pembangunan demikian agak menyimpang dari konsep ideologi Cina. Untuk mensejahterakan rakyatnya maka Deng Xiaoping memiliki interpretasi sendiri yang berbeda mengenai konsep sosialisme. Deng menyatakan bahwa sosialisme adalah suatu cara untuk meningkatkan standar kehidupan dan bukan berarti kemiskinan. Lebih jelas lagi, sosialisme tidak berarti kemiskinan, melainkan sebaliknya bertujuan melenyapkan kemiskinan.²⁸ Tugas pokok sosialisme adalah mengembangkan kekuatan produksi, menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik, dan memenuhi kebutuhan material serta kultural rakyat yang semakin bertambah.

Komune komune pertanian dibubarkan, petani yang semula terkurung dalam komunanya dan bekerja untuk komunanya, pada akhir tahun 1970-an diizinkan untuk menanam apa saja yang mereka sukai, menjual hasil kerjanya, dan yang lebih penting lagi mengantongi keuntungan dari penjualan itu.²⁹ Pembubaran komune menghebohkan Dunia dan negara-negara barat, sebab kebijakan ini telah mengenai dan menghancurkan landasan ekonomi komunis yang selama ini dicetuskan oleh Mao Zedong. Negara-negara barat menganggapnya sebagai gempa yang besar dan bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi pada Cina. Negara-negara komunis seperti

²⁸ Roberts Delfs dan David Bonavia, "A New Kind of Socialism," *Far Eastern Economic Review*, 1 November 1984, pp. 24-25.

²⁹ Tentang peristiwa pembubaran komune, lih. Kate Xiao Zhao, *How the Farmers Changed China* (

Uni Soviet, mengalami "*shocked*" lahirnya bid'ah dinegara komunis terbesar didunia itu. Tapi hal ini merupakan permulaan dari terjadinya perubahan sistem ekonomi dan perubahan di Cina sejak awal tahun 1980-an.³⁰

Cina mulai mengembangkan kebijakan ekonomi pasar menggantikan sistem ekonomi komando Mao Zedong dengan mulai melakukan pembenahan diberbagai sektor dan hasilnya, Cina sejak liberalisasi Deng Xiaoping pada 1979 telah membawa keberhasilan ekonomi RRC dengan rata rata pertumbuhan GNP riil 9 % selama 20 tahun.

Keberhasilan ekonomi tersebut menjadikan RRC sebagai Negara yang membawa perubahan ekonomi dikawasan Asia Timur. Selain itu, ketersediaan jumlah tenaga kerja yang besar dengan aset SDM baik secara kuantitas maupun secara kualitas yang cukup besar untuk industri yang intensif tenaga kerja, serta pasar domestik yang berukuran raksasa telah menjadikan Cina mengalami perubahan yang sangat luar biasa.

Keberhasilan ekonomi Cina telah membawa perubahan besar terhadap pembangunan Cina. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, serta dalam

kurang waktu pemeritahan Deng Xiaoping juga berhasil merubah kehidupan rakyatnya sekitar 400 juta jiwa dari kemiskinan absolute³¹.

Cina dalam hal pertahanan keamanan mengalami keterbatasan penyediaan perlengkapan persenjataan, terlebih setelah Cina menyerang Vietnam dan mendapatkan perlawanan keras pada tahun 1979, munculnya tekanan tekanan international menjadikan Cina harus memperkuat pertahanan keamanannya, dan hal ini tentunya ditunjang dengan stabilitas ekonomi yang harus kuat, dengan demikian Cina melakukan pembenahan-pembenahan secara domestik dengan memperbaiki sktor ekonomi, hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa tidak mungkin pembangunan militer dapat ditingkatkan sementara negara mengalami inflasi yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan modernisasi atau reformasi dibidang ekonomi.¹²

3. Konteks Internasional

Dalam melihat kondisi internasional sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya perubahan kebijakan Ekonomi Cina yang dicetuskan oleh Deng Xiaoping dapat dilihat dari beberapa peristiwa, diantaranya pada saat Cina terlibat konflik perbatasan dengan Vietnam. Vietnam terletak diperbatasan sebelah selatan RRC. Vietnam merupakan wilayah jajahan Cina, Vietnam mengalami penjajahan selama 1000 tahun lamanya, dari tahun 111 SM hingga tahun 939, pada jaman dinasti Tang,

³¹Kompas, *cermin dari Cina. Geliat Sang Naga di Era Gloalisasi*, Kompas, Jakarta,

Vietnam dijadikan wilayah protektorat Cina dan disebut Annam Do Phu, yang berarti protektorat disebelah selatan, yang telah diamankan. Istilah Vietnam itu sendiri berasal dari bahasa Cina yang artinya "melampaui perbatasan selatan" dari (pusat kebudayaan di Cina).³³ Dalam perkembangannya Rakyat Vietnam kemudian melakukan perlawanan-perlawanan sehingga di abad ke 10 Vietnam berhasil menegakkan suatu negara yang merdeka dibawah dinasti pribumi.

Terjadinya pengusiran orang-orang Cina dan penduduk keturunan Cina dari negara Vietnam, dalam pertengahan tahun 1978 menyebabkan Cina merasa dirugikan dan sebagai konsekuensinya Cina merasa perlu mencirikan pelajaran dan hukuman kepada Vietnam. Cina melakukan penyerbuan besar-besaran kedalam wilayah Vietnam, pada bulan februari 1979.³⁴ Dari pelaksanaan "hukuman" bulan Pebruari 1979 itu, pemerintah RRC mendapat umpan balik yang tidak kecil artinya. Pemerintah RRC cukup bersusah payah dan dibuat kewalahan dalam menghadapi Vietnam, yang jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh RRC. Momentum terjadinya pelaksanaan pemberian hukuman kepada Vietnam, menyebabkan RRC mengalami kewalahan

³³ Lihat Tie Tek Tjeng, *Studi Wilayah Pada Umumnya: Asia Timur Pada Khususnya*, *op.cit.* p 274.

³⁴ Serbuan RRC ke Vietnam mempunyai 5 tujuan objektif : (1) menghancurkan infrastruktur militer Vietnam yang mengancam daerah otonomi Guangxi dan propinsi Yunnan di RRC;(2) menghancurkan tentara reguler Vietnam;(3) memaksa Vietnam menarik sebagian pasukannya dari Laos dan Kampuchea, untuk memberikan kesempatan kepada kaum nasionalis kedua negara itu menyusun kekuatan kembali, sehingga dalam menghadapi serbuan RRC, Vietnam telah menarik 3 Divisi dan tentaranya yang ditempatkan di Kampuchea dan dua Divisi lagi dari Laos untuk memperkuat pasukannya; (4) Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dibagian dunia itu RRC tidak bisa dipertanyakan ;(5) menunjukkan kepada Amerika Serikat dan Eropa bahwa RRC tidak mau menyalah pada ancaman Uni Soviet. Sebagai pelengkap, lihat pula "China Connection" dan "China Prepares to

khususnya dalam perekonomian negara, hal ini juga telah mendorong pemerintah RRC untuk memacu program modernisasi negara bidang pertahanan keamanan, dalam hal ini hanya memungkinkan dilakukan dengan melalui reformasi struktur ekonomi nasional.³⁵ Dengan jalan demikian RRC dapat meningkatkan kapabilitas Angkatan bersenjata. Deng Xiaoping sendiri menyatakan bahwa Sosialisme tidak dapat dinilai dengan begitu saja, tanpa melakukan perbaikan standar kehidupan rakyat secara mutlak, sambil meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan.³⁶

Program modernisasi pertahanan keamanan tanpa reformasi struktur ekonomi nasional dalam masa sebelumnya, memberikan hasil yang tidak memadai bagi RRC. Karena bagaimana mungkin, tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil, struktur ekonomi alam mementingkan dari segi pemerataan daripada pertumbuhan, dapat diharapkan memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata.³⁷

³⁵ Dalam pernyataan-pertanyaanya Deng mengaitkan ini dengan keinginan RRC untuk dapat menghadapi agresi dan subversi bangsa lain. Lihat "*Speech at The Opening Ceremony of The National Conference on Science*" 18 maret 1978, op.cit.; p 41.

³⁶ Poltak Partogi Nainggolan, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, p 115.

E. Hipotesa

Dari kerangka teori yang digunakan maka dapat ditarik suatu hipotesa sebagai berikut:

Kebijakan ekonomi Deng Xiaoping yang menggabungkan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis mempengaruhi arah kebijakan Politik Luar Negeri Cina dari tertutup menjadi terbuka .

F. Jangkauan Penelitian

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terlalu meluas, maka penulis mencoba membatasi permasalahan yang terjadi hanya pada masa Deng Xiaoping, meskipun tidak menutup kemungkinan dibahasnya persoalan persoalan diluar periode pemerintahan Deng Xiaoping, tetapi terkait dengan pokok permasalahan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana kajian yang sering ditemui dalam ilmu sosial, dalam mencari data-data yang diperlukan untuk menunjang penulisan skripsi ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, laporan riset, surat kabar maupun

implikasi terhadap politik luar negeri Cina. pencarian data juga dilakukan dengan melakukan searching di berbagai website di internet.

II. Sistematika Penulisan

BAB I akan menulis tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data dan kerangka penulisan.

BAB II akan menulis tentang gambaran umum tentang kebijakan Politik Luar Negeri Cina. bab ini menjelaskan bagaimana sistem politik, sistem ekonomi, kebijakan luar negeri yang meliputi dasar-dasar politik luar negeri Cina serta bagaimana strategi politik luar negeri Cina pasca tragedi Tian'anmen.

BAB III akan menulis tentang seputar kebijakan ekonomi Cina pada masa Deng Xiaoping, bagaimana proses masuknya kapitalisme, dampak reformasi ekonomi, program reformasi ekonomi, proses masuknya modal asing ke Cina dengan konsep politik pintu terbuka dan Rekonseptualisasi atau perubahan Konsep Ekonomi Cina, pada masa Deng Xiaoping. Pada bab ini juga dijelaskan pula bagaimana hasil dari reformasi ekonomi Cina mampu merubah RRC menjadi negara yang maju ekonominya sehingga menyebabkan Cina mampu bangkit menjadi negara maju.

BAB IV akan menulis tentang pengaruh reformasi ekonomi terhadap politik Luar Negeri Cina. Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana interaksi Cina dalam

perekonomian internasional, serta bagaimana peran Cina dalam politik internasional di dunia internasional, hal ini dapat dilihat melalui peran RRC dalam organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan hubungan Cina dengan Amerika Serikat.

RAP V merupakan bab penutup yaitu merupakan kesimpulan dari bab-bab